



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUSRIZAL**
2. Jabatan : **DIREKTUR PEMASARAN**
3. NHK : **105450**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 39.940.000.000

1. Bangunan Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Bangunan Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Bangunan Seluas 6.9 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
4. Bangunan Seluas 13 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Bangunan Seluas 83 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
6. Bangunan Seluas 83 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 925 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
10. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.420.000.000



1. MOBIL, FORD ESCAPE MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	624.281.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.822.139.283
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	46.806.420.283
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	46.806.420.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.